

POLITIK MULTIKULTURALISME VERSUS PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEMBANGUN CIVIC RESPONSIBILITY PADA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh:
Dr. Anita Trisiana,SPd,MH
Progdi PPKn FKIP Unisri Surakarta
(anita.trisiana@gmail.com)

ABSTRAK

Sejatinya Keberagaman masyarakat Indonesia, menjadi penopang bagi kokohnya pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia. Multikulturalisme sering dipersepsi sebagai politik pengajaran dan nilai keragaman pada tatanan masyarakat plural. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederhana, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Dengan demikian ditengah gejolak keberagaman tersebut, pembangunan karakter bangsa muncul tidak serta merta, tetapi secara komprehensif berpengaruh dan berdampak terhadap pembentukan tanggung jawab warganegaranya (*civic responsibility*).

Politik Multikulturalisme menjadi tantangan bagi pengembangan implementasi pendidikan Karakter bangsa yang menjadi wadah bagi ketercapaian kompetensi warga Negara. Civic Responsibility sebagai bagian dari kompetensi kewarganegaraan mempunyai relevansi dengan penguatan dan pengembangan Pendidikan Karakter bangsa serta pembangunan sumber daya manusia yang siap bersaing dan berkompentensi dalam masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun karakter bangsa yang mendesak untuk diterapkan. Pendidikan karakter menjadi vital dan tidak ada pilihan lagi untuk mewujudkan Indonesia baru yaitu Indonesia yang dapat menghadapi tantangan kontemporer Pendidikan Kewarganegaraan di era global.

Keywords: *Politik Multikulturalisme, Pendidikan Karakter, Civic Responsibility, Pendidikan Kewarganegaraan*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Potensi konflik dalam masyarakat yang multikultural cukup besar, karena itu pendidikan yang mampu membangun karakter warga negara yang cinta damai mutlak diperlukan. Sebab tanpa kepemilikan karakter tersebut, sulit bagi bangsa dan negara untuk tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan, berbagai konflik yang lahir dari realitas kebhinnekaan tersebut. Dalam hal ini, pendidikan adalah jembatan paling penting untuk membentuk karakter masyarakat yang multikultural. Kalau dulu sosok keteladanan diberikan oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh nasional bangsa yang lainnya. Sekarang keteladanan menjadi barang yang langka. Para elit sudah tidak lagi memberikan keteladanan bagi masyarakat. Mereka lebih mementingkan kepentingannya masing-masing dan tidak memikirkan upaya untuk kemajuan bangsanya. Seperti keteladanan yang sudah diberikan tokoh bangsa terdahulu. Karakter yang sudah digagas oleh pendiri bangsa ini adalah karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu *Nation and Character Building* dan merupakan bagian dari penguatan *civic responsibility*

Pernyataan Ellen G. White yang dikutip Hidayatullah (2011) menyebutkan bahwa pembangunan karakter adalah usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia. Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar. Pernyataan tersebut memberikan penguatan bahwa pembangunan karakter tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Bahkan Stiles (Hidayatullah, 2011) menyatakan bahwa “Pembangunan karakter tidak dapat dilakukan dengan serta merta tanpa upaya sistematis dan terprogram sejak dini”. Dalam konteks itu, maka diperlukan suatu tatanan nilai yang mampu merubah, membenahi segala persoalan yang ada.

2. Permasalahan

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah: “Bagaimanakah politik multikulturalisme versus pendidikan karakter dalam membangun *civic responsibility* pada pendidikan kewarganegaraan?”

3. Urgensi Masalah

Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa tantangan pengembangan pendidikan karakter tidak hanya menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan pendidikan di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat multikultural, tetapi akan terjawab bila: (1) Keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh alternatif untuk memperkaya pelaksanaan proses pendidikan; (2) Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses dan (3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan inovasi dalam dunia pendidikan.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan bagian esensial yang menjadi tugas sekolah, tetapi selama ini kurang perhatian. Akibat minimnya perhatian terhadap pendidikan karakter dalam ranah persekolahan, sebagaimana dikemukakan Lickona telah menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit sosial di tengah masyarakat. Idealnya, sekolah tidak hanya berkewajiban meningkatkan pencapaian akademis, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter peserta didik. Namun, tuntutan ekonomi dan politik pendidikan menyebabkan penekanan pada pencapaian akademis mengalahkan idealitas peran sekolah dalam pembentukan karakter.

Pendidikan karakter diartikan sebagai *the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development* (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah untuk membantu pengembangan karakter dengan optimal). Hal ini berarti untuk mendukung perkembangan karakter peserta didik harus melibatkan seluruh komponen di sekolah baik dari aspek isi (*the content of the curriculum*), proses pembelajaran (*the process of instruction*), kualitas hubungan (*the quality of relationships*),

penanganan mata pelajaran (*the handling of discipline*), pelaksanaan aktivitas ko-kurikuler, serta etos seluruh lingkungan sekolah (Zubaedi, 2011:14) .

Menurut David Elkind dan Freddy Sweet (Zubaedi, 2011:15) *character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical value* (pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk membantu manusia memahami, peduli, dan melaksanakan nilai-nilai etika inti). Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang kita inginkan bagi anak-anak, maka jelas bahwa kita mengharapkan mereka mampu menilai apakah kebenaran, peduli secara sungguh-sungguh terhadap kebenaran, dan kemudian mengerjakan apa yang diyakini sebagai kebenaran, bahkan ketika menghadapi tekanan dari luar dan upaya dari dalam.

Pendidikan karakter menurut Ratna Megawangi (2004:95), merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Definisi lain dikemukakan oleh Fakry Gaffar (2010:10) bahwa pendidikan karakter merupakan transformasi nilai-nilai kehidupan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu.

Karakter didefinisikan oleh Ryan dan Bohlin (Ahmad Tafsir, 2011) mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*loving the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Dalam pendidikan karakter kebaikan itu sering kali dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik. Dengan demikian, maka pendidikan karakter adalah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar baku. Upaya ini juga memberi jalan untuk menghargai persepsi dan nilai-nilai pribadi yang ditampilkan di sekolah. Fokus pendidikan karakter adalah pada tujuan etika, tetapi praktiknya meliputi penguatan kecakapan yang penting yang mencakup perkembangan sosial siswa.

Homby dan Parnwell (Ahmad Tafsir, 2011) karakter adalah kualitas mental, kekuatan moral, nama atau reputasi. Hermawan Kertajaya mendefinisikan karakter adalah “ciri khas” yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan mesin pendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.

Istilah karakter dan kepribadian atau watak sering digunakan secara bertukar-tukar, tetapi Alport menunjukkan kata watak berarti normatif, serta mengatakan bahwa watak adalah pengertian etis dan menyatakan bahwa *character is personality evaluated and personality is character devaluated* (watak adalah kepribadian dinilai, dan kepribadian adalah watak yang tak dinilai). Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat abstrak yang ada pada diri seseorang (Lickona, 2004).

Dinamika pemahaman pendidikan karakter berproses melalui tiga momen: momen historis, momen reflektif, dan momen praktis. Momen historis, yaitu usaha merefleksikan pengalaman umat manusia yang bergulat dalam menghidupi konsep dan praksis pendidikan khususnya dalam jatuh bangun mengembangkan pendidikan karakter bagi anak didik sesuai dengan konteks zamannya. Momen reflektif, sebuah momen yang melalui pemahaman intelektualnya manusia mencoba melihat persoalan metodologis, filosofis, dan prinsipil yang berlaku bagi pendidikan karakter. Momen praktis, yaitu dengan bekal pemahaman teroretis konseptual itu, manusia mencoba menemukan secara efektif agar proyek pendidikan karakter dapat efektif terlaksana di lapangan (Masnur Muslich, 2011).

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila meliputi: (1) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadimanusia berhati baik, berpikir baik, dan perilaku baik. (2) Membangun bangsa yang berkarakter Pancasila. (3) Mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia (Kemendiknas, 2011:7). Dalam konteks pendidikan karakter, kemampuan yang harus dikembangkan melalui persekolahan adalah berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia. Selain itu, pendidikan karakter harus diarahkan pada pembentukan watak.

Selain itu, pendidikan karakter memiliki tiga (3) fungsi utama. Pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab

dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsalain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Pendidikan karakter berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Ketiga fungsi ini dilakukan melalui; (1) penguatan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, (2) penguatan nilai dan norma konstitusional UUD 45, (3) penguatan komitmen kebangsaan negara keatuan Republik Indonesia (NKRI), (4) penguatan nilai-nilai keberagaman sesuai dengan konsepsi Bhineka Tunggal Ika, dan (5) penguatan keunggulan dan daya saing bangsa untuk keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dalam konteks global.

Menurut Dony Kusuma, pendidikan karakter merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai-nilai sehingga menghasilkan disposisi aktif, stabil dalam diri individu. Dinamika ini membuat pertumbuhan individu menjadi semakin utuh. Unsur-unsur ini menjadi dimensi yang menjiwai proses formasi setiap individu. Pendidikan karakter sebagai sebuah program kurikuler telah dipraktekkan di sejumlah negara. Pendidikan karakter adalah segala upaya yang dilakukan guru, yang mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Pendidikan karakter dari sisi substansi dan tujuannya sama dengan pendidikan budi pekerti, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan secara mendasar, karena membawa perubahan individu sampai ke akar-akarnya.

2. Konsep Civic Responsibility

Winataputra (2001: 131) memperhatikan perkembangan pemikiran tentang *civic* dan *civic education*, atas dasar kajiannya secara teoritik, Winataputra merumuskan pengertian pengertian “*civics*,” *citizenship/civic education*” sebagai berikut:

- a. *“Civics is the study of government taught in the schools. It is an area of learning dealing with how democratic government has been and should be carried out, and how the citizen should carry out his duties and rights purposefully with full responsibility.”*
- b. *“Civic/Citizenship education can be defined in two ways:
In the first sense, Civic Education is an area of learning, primarily intended to develop knowledge attitudes, and skills so the students become “good citizens, with learning experiences carefully selected and organized around the basic concepts of political science, In another sense, Civic Education is a by-product of variety of areas of learning undertaken in and out-of formal school settings as well as a by-product of a complex network of human interactions in daily activities concerned with the development of civic responsibility.”*

Disimpulkan berdasarkan pendapat Winataputra di atas mengenai definisi mengenai pendidikan kewarganegaraan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang berisikan tentang pemerintahan yang diajarkan di sekolah, dimana dalam keadaan pemerintahan yang demokratis tersebut, warga negara hendaknya melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Komalasari dan Budimansyah (2008: 77) mengatakan bahwa, perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) tidak bisa diisolasi dari kecenderungan globalisasi yang berdampak pada kehidupan siswa. Globalisasi menuntut pendidikan kewarganegaraan mengembangkan *civic competence* yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang multidimensional. Pendidikan Kewarganegaraan pun mengemban misi *Civic Education for Democration dan Value-Based Education*.

Secara konseptual ilmiah, semua imperatif atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan *“civic intelligence” dan “civic participation”* serta *“civic responsibility”* sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan peradaban bangsa Indonesia yang ber-Pancasila.

Tiga pusat perhatian dalam Pendidikan Kewarganegaraan yaitu *Civic Intellegence* (kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional

maupun sosial), *Civic Responsibility* (kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab) dan *Civic Participation* (kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin hari depan)

3. Konsep Politik Multikulturalisme

Multikulturalisme secara etimologis marak digunakan pada tahun 1950-an di Kanada. Menurut Longer Oxford Dictionary istilah "*multiculturalism*" merupakan deviasi dari kata "*multicultural*". Arah atau tujuan politik multikulturalisme adalah: "Pengakuan keberagaman budaya yang menumbuhkan kepedulian agar berbagai kelompok yang termarginalisasi dapat terintegrasi, dan masyarakat mengakomodasi perbedaan budaya agar kekhasan identitas mereka diakui". Sedangkan Sasaran dari politik multikulturalisme adalah: Membentuk toleransi, keterbukaan, dan solidaritas. Membangun artikulasi politik dan multikulturalisme guna menciptakan ruang publik agar beragam komunitas berinteraksi untuk memperkaya budaya dan memfasilitasi konsensus. Mengimbangi kebijakan ekonomi yang teknokratis, multikulturalisme mengusulkan sistem baru representasi dan partisipasi. Penataan ruang publik menyangkut tiga aspek, yaitu fisik-sosial, budaya, dan politik.

Isu multikultural kemudian semakin mengkristal dalam pandangan yang lebih ekstrem, yaitu multikulturalisme. Dengan adanya tambahan "isme" dari akar katanya (multikultural), istilah ini ternyata semakin tidak mudah dipahami. Menurut, Bethany Bryson (Rohmat Mulyana, 2006), seorang profesor dari Universitas Virginia, mencoba menelusuri kompleksitas makna kata tersebut. Ia mewawancarai sejumlah profesor berkaliber dalam urusan multikultural yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa makna istilah tersebut ternyata masih kabur dan perlu diperjuangkan.

Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan (Fay 1996, Rex 1985, Suparlan 2002).

Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi:

"kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah". (Suparlan,1999). Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan, yaitu: pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Keempat pendidikan dwi-budaya. Kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.

Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional.

4. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Definisi pendidikan kewarganegaraan menurut Winataputra (2010), bahwa pendidikan kewarganegaraan juga berisikan tentang bagaimana mengembangkan sikap, keterampilan siswa untuk menjadi warga negara yang baik, dimana siswa bisa mendapatkannya melalui pengalaman belajar dan memiliki konsep-konsep dasar ilmu politik. Juga dalam pendidikan kewarganegaraan, siswa dapat berinteraksi melalui kehidupan sehari-hari untuk berkembang menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Menurut Udin S. Winataputra, (2008:3) secara universal diakui bahwa “Komponen kajian pokok Pendidikan Kewarganegaraan mencakup aspek pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*)”. Ketiga komponen tersebut harus dicapai dalam proses pembelajaran secara terintegrasi atau menyeluruh.

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Winarno (2006:29-30), terdapat dalam Standar Isi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Persekolahan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: “1). Persatuan dan Kesatuan Bangsa, 2). Norma, Hukum dan Peraturan, 3). Hak Asasi Manusia, 4).

Kebutuhan Warga Negara, 5). Konstitusi Negara, 6). Kekuasaan dan Politik, 7). Pancasila, 8). Globalisasi”. Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut, dapat dijelaskan secara lengkap dibawah ini:

- a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- b. Norma, Hukum dan Peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- c. Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan Warga Negara, meliputi: hidup gotong-royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini merupakan suatu pembahasan secara formil dan matrial untuk mencapai sasaran berkaitan dengan warganegara yang baik, meliputi wawasan, sikap, dan prilaku warganegara dalam kesatuan bangsa dan negara.

5. Solusi Yang Ditawarkan

Politik Multikulturalisme dijalankan menjadi pendukung dari pelaksanaan pendidikan karakter, yaitu melalui konsep pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antar kelompok mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas "merayakan keragaman" belaka. Apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasis. Dapat pula dipertanyakan apakah mungkin meminta siswa yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami diskriminasi atau penindasan karena warna kulitnya atau perbedaannya dari budaya yang dominan tersebut? Dalam kondisi demikian pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi.

Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu: **Pertama**, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer menegembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif self sufficient, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotip

menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik. **Ketiga**, karena pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi. **Kelima**, kemungkinan bahwa pendidikan (baik dalam maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikhotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik. (Suparlan, 2001).

Perlu adanya upaya pengkajian untuk memilih paradigma pendidikan yang mampu menjabarkan kebutuhan-kebutuhan substantif pendidikan dalam berbagai dimensi dan konteks keilmuan untuk menjawab tantangan kekinian dalam kehidupan global, disamping juga diperlukan perubahan orientasi pendidikan, yang: (1) dari sentralistik ke desentralistik; (2) dari sisi pendekatan parsial-sektoral ke holistik-intersektoral; (3) dari penyelenggaraan KBM *teacher centered* ke *student centered*; dan (4) dari mutu pendidikan yang berorientasi pada wawasan lokal-nasional ke mutu pendidikan yang bertaraf internasional.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Dalam melakukan kajian dasar mengenai Pengembangan pendidikan karakter ditengah masyarakat yang beragam, muncul berbagai tantangan dalam membangun tanggungjawab warganegara (*civic responsibility*), dalam perspektif politik multikulturalisme antara lain, bahwa: 1). Masyarakat adalah ekstensi yang hidup, dinamis, dan selalu berkembang. 2) Masyarakat bergantung pada upaya setiap individu untuk memenuhi kebutuhan melalui hubungan dengan individu lain yang berupaya memenuhi kebutuhan. 3) Individu-individu, di dalam berinteraksi dan berupaya bersama guna memenuhi kebutuhan, melakukan penataan terhadap upaya tersebut dengan jalan apa yang disebut tantangan sosial. 4) Setiap masyarakat bertanggung jawab atas pembentukan pola tingkah laku antara individu dan komunitas yang membentuk masyarakat. 5) Pertumbuhan individu di dalam komunitas, keterikatan dengannya, dan perkembangannya di dalam bingkai yang menuntunya untuk bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya.

2. Saran

Saran dari kesimpulan diatas adalah: **pertama** perlunya lembaga akuntabilitas pendidikan nasional yang bertugas untuk: (1) memperhatikan dan mengikuti perkembangan pendidikan bangsa-bangsa lain, sehingga pendidikan nasional memiliki daya saing internasional; (2) menentukan arah, tujuan dan hasil-hasil pembangunan pendidikan jangka menengah yang ingin dicapai; (3)menentukan kriteria pendidikan nasional yang berorientasi pada dinamika perubahan standar internasional; **kedua**; mengembangkan model-model pengelolaan pendidikan (*educational management*) yang mempertimbangkan diversifikasi pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang beragam.

3. Rekomendasi

Politik Multikulturalisme menjadi tantangan bagi pengembangan implementasi pendidikan Karakter bangsa yang menjadi wadah bagi ketercapaian kompetensi warga Negara. Pendidikan karakter menjadi vital dan tidak ada pilihan lagi untuk mewujudkan Indonesia baru yaitu Indonesia yang dapat menghadapi tantangan kontemporer Pendidikan Kewarganegaraan di era global, untuk itu rekomendasinya adalah sebagai berikut:

Pertama; mengembangkan gagasan-gagasan pembangunan pendidikan yang diturunkan dari prioritas kebijakan pembangunan nasional, yang melibatkan kepentingan-kepentingan inter-sektoral dan inter-disiplin; **Kedua**; Mengembangkan panduan KBM yang lebih ditekankan pada

pengembangan dan pembinaan inisiatif serta kreativitas siswa; ***Ketiga***; Mengembangkan dan membina program-program peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi berorientasi pada materi kurikuler dan mutu serta standar penilaian yang secara internasional dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tafsir, 2011. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Furqon Hidayatullah, M, 2011. *Guru Sejati: Membangun berkarakter kuat dan cerdas*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Lickona, T. 1992. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Simon & Schuster, Inc.
- _____. 2004. *Character Matters: How to Help Our Children Develop*. New York: Simon & Schuster, Inc.
- Kemendiknas, 2011. *Kebijakan Pendidikan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas.
- Komala & Budimansyah. 2008. *Mamahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek
- Masnur Muslich. 2011. *Pendidikan Karakter (menjawab tantangan kritis multidimensional)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Megawangi, Ratna, 2004. *Pengembangan Program Pendidikan Karakter Di Sekolah: Pengalaman Sekolah*. [http://pendidikan.com/Pilar pendidikan Karakter](http://pendidikan.com/Pilar_pendidikan_Karakter). Diakses pada tanggal 15 Januari 2014.
- Rohmat Mulyana, 2006. *Multikulturalisme dan Nilai Agama*. Jurnal pendidikan
- Suparlan, 1999. *Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme*. *Jurnal Studi Amerika*, vol.5 Agustus, hal. 35-42.
- _____, 2001a, "*Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?*" makalah disampaikan dalam Seminar

_____, 2001b, "Indonesia Baru Dalam Perspektif Multikulturalisme". *Harian Media Indonesia*, 10 Desember 2001.

_____, 2002. *Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia*. Jurnal Antropologi Indonesia nomor 6

Winataputra, Udin S. 2001. *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila (Suatu Penelitian Kepustakaan)*. Jakarta: Universitas Terbuka

Zubaedi, 2011. *Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana